

● KLIPING BERITA ●

BPK BUKA BOROK PERMAINAN ANGGARAN RSUD SUMBAWA, BELANJA RP 2,5 MILIAR TAK DIDUKUNG BUKTI



ANGGARAN BERMASALAH: Pengelolaan anggaran RSUD Sumbawa tahun 2023 diduga bermasalah. BPK menemukan adanya penggunaan anggaran tanpa didukung bukti riil. (Dok. Lombok Post)

LombokPost--Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB mengungkap dugaan permainan anggaran RSUD Sumbawa tahun 2023.

Lembaga auditor ini menemukan adanya pengadaan barang dan jasa tidak didukung bukti. BPK juga mengungkapkan adanya pemberian fee terhadap perusahaan yang dipinjam untuk belanja kebutuhan RSUD.

Nilai temuan BPK ini mencapai miliaran.

Diketahui, RSUD Sumbawa mengelola anggaran Rp 64.128.037.011.

Anggaran tersebut digunakan untuk belanja ATK, bahan bakar, bahan dan alat kebersihan, makan minum petugas, belanja cetak, makanan dan minuman rapat, dan pemeliharaan ambulans.

Selain itu, pemeliharaan instalasi dan jaringan, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan kendaraan kantor dan rumah tangga.

Ditambah pemeliharaan sarana dan prasarana mesin, pemeliharaan sarana dan prasarana pendingin ruangan, belanja penggandaan, serta belanja perlengkapan dan peralatan rumah tangga.

BPK mengaudit transaksi sub jenis pengadaan barang dan jasa pada 22 penyedia dengan nilai belanja Rp 2.726.628.735.

● KLIPING BERITA ●

BPK BUKA BOROK PERMAINAN ANGGARAN RSUD SUMBAWA, BELANJA RP 2,5 MILIAR TAK DIDUKUNG BUKTI

Hasil pemeriksaan secara uji petik penggunaan anggaran tersebut menunjukkan adanya pemberian fee kepada perusahaan yang dipinjam namanya Rp 52.769.318.

Ditemukan juga kelebihan pembayaran karena selisih harga pengadaan makan dan minum yang diakui rekanan penyedia riil serta selisih harga pengadaan BBM Rp 80.678.490.

BPK juga mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban belanja tidak didukung bukti senyatanya (riil) senilai Rp 2.540.383.187.

Menurut BPK, fee dalam pengadaan barang dan jasa pada RSUD Sumbawa Rp 52 juta lebih itu diberikan kepada perusahaan yang dipinjam namanya.

Sehingga perusahaan yang tertera dalam surat pertanggungjawaban (SPJ), sebenarnya bukan penyedia riil.

Tim auditor telah mengkonfirmasi kepada pihak penyedia sesuai dokumen SPJ.

Ternyata, RSUD Sumbawa merealisasikan belanja barang dan jasa dengan cara meminjam nama empat perusahaan yaitu CV PA, CV RFK, CV SYA, dan UD PRM.

Peminjaman nama empat perusahaan ini untuk belanja ATK, bahan dan alat kebersihan, belanja cetak, makanan dan minuman rapat, pemeliharaan instalasi dan jaringan, pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga.

Selain itu, pemeliharaan sarana dan prasarana mesin, pemeliharaan sarana dan prasarana pendingin ruangan, penggandaan, serta perlengkapan dan peralatan rumah tangga.

Modusnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) meminjam nama perusahaan dengan cara terlebih dahulu menyampaikan dokumen SPJ.

SPJ itu dibuat PPTK atau bendahara pengeluaran kepada pihak perusahaan yang dipinjam.

Selanjutnya, pihak perusahaan yang dipinjam akan menandatangani dan membubuhkan cap atau stempel pada dokumen SPJ dan tagihan.

Untuk mengakalinya, nilai SPJ ini sesuai dengan nilai belanja dalam RBA RSUD.

Kemudian, pihak PPTK memproses SPJ tersebut untuk pencairan.

Setelah SPJ tersebut cair, pihak RSUD Sumbawa menghubungi perusahaan yang dipinjam untuk memberitahukan bahwa pembayaran atas belanja tersebut telah masuk ke rekening perusahaan.

● KLIPING BERITA ●

BPK BUKA BOROK PERMAINAN ANGGARAN RSUD SUMBAWA, BELANJA RP 2,5 MILIAR TAK DIDUKUNG BUKTI

Kemudian, perusahaan tersebut menarik secara tunai sejumlah nilai pembayaran dan menyerahkan uang tunai kepada PPTK Tata Usaha.

Setiap transaksi menggunakan nama empat perusahaan itu dibebankan fee sebesar 5 persen dari nilai uang yang masuk ke rekening pemilik perusahaan.

Angka ini berdasarkan kesepakatan RSUD Sumbawa dengan pemilik perusahaan.

Diketahui, RSUD Sumbawa memberikan fee kepada CV PA, CV RFK, CV SYA dan UD PRM totalnya Rp 52.769.318. Namun telah disetorkan ke kas BLUD RSUD Sumbawa.

Temuan tak kalah mengejutkan pada item pengadaan barang dan jasa Rp 2.540.383.187.

RSUD Sumbawa tidak mengantongi bukti-bukti transaksi senyatanya, berupa pesanan, order, bon, permintaan barang, faktur, dan tagihan dari penyedia.

RSUD Sumbawa hanya mendokumentasikan kuitansi dinas yang ditandatangani secara bervariasi penyedia, bendahara pengeluaran, PPTK, serta Direktur RSUD Sumbawa.

Kuitansi dinas disediakan RSUD Sumbawa dengan nilai sesuai dengan RBA.

Keterbatasan dokumen transaksi, diakui BPK, menyulitkan untuk pengujian atas validitas bukti-bukti transaksi.

Selain itu, pembelian barang persediaan tidak dapat ditelusuri ke pencatatan mutasi persediaan maupun buku gudang.

Itu karena tidak adanya pencatatan mutasi persediaan.

BPK telah melakukan prosedur alternatif dengan menggali keterangan kepada penyedia untuk menguji kebenaran kuantitas dan harga.

Namun penyedia tidak dapat memberikan informasi dan bukti-bukti transaksi.

Kondisi tersebut menjadi kendala BPK tidak dapat melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai.

Sehingga disimpulkan realisasi pengadaan barang dan jasa Rp 2,5 miliar ini tidak dapat diyakini kewajarannya.

BPK merekomendasikan Bupati Sumbawa agar memerintahkan Direktur RSUD Sumbawa untuk mendokumentasikan bukti-bukti transaksi dengan penyedia barang dan jasa.

Menginstruksikan PPK-SKPD untuk memverifikasi kebenaran materiil bukti-bukti pertanggungjawaban belanja barang dan jasa.

● KLIPING BERITA ●

BPK BUKA BOROK PERMAINAN ANGGARAN RSUD SUMBAWA, BELANJA RP 2,5 MILIAR TAK DIDUKUNG BUKTI

BPK juga merekomendasikan agar Inspektorat Sumbawa melakukan pemeriksaan khusus atas pengadaan barang dan jasa Rp 2,5 miliar.

Hasilnya nanti disampaikan kepada BPK melalui kepala daerah.

Kepala Inspektorat Sumbawa Amri tidak membantah adanya temuan tersebut.

Sayangnya, dia enggan mengomentari banyak temuan BPK.

Termasuk ditanya pemeriksaan khusus atas pengadaan barang dan jasa Rp 2,5 miliar tak didukung bukti riil.

Amri malah menyarankan Koran ini untuk menghubungi bawahannya.

"Silakan hubungi pak Sekretaris saja ya, Pak Made," kata dia dikonfirmasi Lombok Post, Rabu (19/6).

Direktur RSUD Sumbawa dr Nita Ariyani yang dikonfirmasi belum merespons.

Dihubungi via telepon genggam, dia tak kunjung menjawab.

Begitu pula dengan pesan singkat. Hingga tadi malam, dr Nita belum membalasnya. (jlo/r8)